

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Masyarakat Pedesaan

a. Pengertian Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu kata *musyarak* yang artinya bersama-sama, lalu berubah menjadi masyarakat yang berarti berkumpul bersama-sama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Sementara itu, dalam bahasa Inggris istilah masyarakat terbagi menjadi dua pengertian yakni *society* dan *community*.⁵

Masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni; Pertama, *community* sebagai unsur statis yang berarti *community* terbentuk dalam suatu tempat atau wadah dengan dibatasi oleh ketentuan, maka dari sanalah ia menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga ia dapat disebut dengan masyarakat setempat. Kedua, *community* sebagai unsur yang berarti menyangkut suatu prosesnya yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antara manusia, maka dari itu didalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan serta tujuan yang sifatnya fungsional. Dalam pengertian *society* dikatakan masyarakat jika terdapat interaksi sosial, perubahan-perubahan sosial, perhitungan-perhitungan

⁵ Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hlm. 30

rasional dan hubungan-hubungan menjadi bersifat pamrih dan ekonomis.⁶

Beberapa ahli memberikan pandangan mengenai masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut :⁷

1) Hasan Shadly M.A.

Dalam bukunya yang berjudul “Sosiologi untuk masyarakat Indonesia” yaitu : “Golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyaipengaruh satu sama lain”.

2) Prof. Dr. P.J. Bouman

Beliau menuangkan pemikirannya dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Masyarakat” bahwa masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antara manusia, dipersatukan dengan cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan mereka.

3) dr. A. Lysen

Dalam bukunya yang berjudul “Individu dan Masyarakat” beliau menjelaskan bahwa masyarakat adalah hubungan antara kekuatan-kekuatan dari bentuk-bentuk masyarakat dan kehidupan individu.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup di suatu tempat tertentu dan dipersatukan oleh keinginan yang sama sehingga saling mempengaruhi antara satu dan lainnya.

⁶*Ibid.*, hlm. 31

⁷Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1994), hlm. 21-22

b. Syarat-Syarat Timbulnya Masyarakat

Adapun syarat-syarat timbulnya masyarakat adalah sebagai berikut;⁸ Pertama, harus terdapat pengumpulan manusia dalam jumlah banyak. Dapat dikatakan masyarakat jika pada suatu tempat terdapat perkumpulan individu yang banyak. Kedua kumpulan individu tersebut hidup dan tinggal di suatu tempat tertentu dalam waktu yang cukup lama atas kesadaran bersama. Ketiga, adanya aturan-aturan yang ditujukan untuk mengatur kepentingan bersama. Aturan tersebut dibuat atas kesepakatan bersama agar setiap individu memiliki pedoman dalam berperilaku baik di lingkungan tempatnya tinggal maupun di tempat lain sehingga dapat mewujudkan ketertiban dan mampu meminimalisir adanya kekacauan dan perpecahan.

c. Faktor-Faktor Yang Mendorong Manusia Bermasyarakat

Sudah menjadi fitrah manusia sejak dilahirkan tertarik untuk hidup bermasyarakat, hal ini disebabkan karena dipengaruhi oleh dorongan/hasrat yang merupakan unsur-unsur kerohanian yang mempengaruhi unsur hidup manusia. Diantara hasrat atau dorongan yang dimaksud ialah :

⁸ *Ibid.*, hlm. 22

- 1) Hasrat sosial yaitu dorongan ketika individu memiliki keinginan dengan individu atau kelompok yang lain.
- 2) Hasrat meniru yaitu dorongan untuk menyatakan baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan sebagian dari salah satu tindakan.
- 3) Hasrat berjuang yaitu dorongan untuk mengalahkan lawan atau sering kita kenal dengan persaingan sehingga individu tersebut mendapatkan sesuatu yang lebih baik.
- 4) Hasrat bergaul yaitu dorongan untuk ikut bergabung dengan individu atau kelompok lain sehingga menjadi bagian dari mereka.
- 5) Hasrat untuk memberitahukan yaitu dorongan untuk menyampaikan apa-apa yang dirasakan kepada orang lain. Hal ini bertujuan untuk mencari hubungan dengan orang lain.
- 6) Hasrat untuk mendapatkan kebebasan yaitu dorongan untuk menghindarkan diri dari kekangan atau pembatasan yang memungkinkan keterbatasan ruang seseorang untuk bergerak.
- 7) Hasrat seksual yaitu dorongan untuk menyumbangkan keturunannya.

Manusia adalah makhluk yang lemah jika harus melakukan segala sesuatunya sendiri. Hal tersebut terjadi karena manusia tercipta untuk hidup saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.

Maka dari itu manusia hidup bermasyarakat untuk mencari kekuatan, melengkapi satu sama lain sehingga mempermudah manusia ketika mengatasi kesulitan yang dihadapi.

d. Ciri-ciri masyarakat pedesaan

Sejatinya setiap hal yang kita temui pasti memiliki ciri khas yang mudah untuk dikenali, sama halnya dengan masyarakat pedesaan dengan ciri khasnya yang membedakannya dengan masyarakat perkotaan adalah sebagai berikut :⁹

1) Konflik dan persaingan

Mayoritas orang beranggapan desa sebagai tempat manusia hidup dengan tenang, tentram juga sebagai tempat orang hidup berdekatan secara terus menerus. Meski demikian anggapan tersebut tidak tepat dengan kenyataan yang ada, kesempatan timbulnya pertengkaran tidak dapat dipungkiri mengingat masyarakat sendiri adalah kumpulan dari individu-individu yang memiliki pemikiran dan keinginan yang berbeda. Sumber dari pertengkaran yang terjadi pada masyarakat pedesaan di Indonesia berkisar sekitar urusan tanah, masalah kependudukan dan gengsi, perkawinan, perbedaan antara kaum muda dan kaum tua, serta antara wanita dan pria.

2) Kegiatan bekerja

Orang yang bisa bekerja keras dan berhasil sedapat mungkin adalah orang yang dinilai tinggi di masyarakat. Sebagian orang

⁹ Sayogyo Dan Pudjiwati Sayogyo, *Sosiologi Pedesaan Jilid I*, (Jakarta : Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 34-43

berpendidikan bahwa supaya orang desa maju makan harus didorong untuk bekerja lebih keras, tetapi seorang ahli ekonomi bernama B.F. Hoselitz membantah pendirian tersebut, hal itu dijelaskan dalam bukunya yang berjudul *Role of Incentives in Industrialization* bahwa untuk membangun suatu masyarakat yang ekonominya terbelakang kita harus bisa menyediakan sistem perangsang yang dapat menarik aktivitas warga masyarakat. Dengan adanya sistem itu harus dapat meningkatkan kegiatan orang untuk bekerja dan memperbesar keberanian untuk mengubah kebiasaan lama.

Singkatnya, mereka perlu untuk ditarik dan didorong untuk bekerja keras, hanya saja sistem bekerjanya harus dipelihara dengan disiplin agar tenaga yang telah dikeluarkan dapat memberikan hasil yang optimal.

3) Sistem tolong menolong

Tolong menolong atau di Indonesia umum disebut dengan istilah gotong royong sudah menjadi bagian dari kehidupan dalam masyarakat, terlebih bagi mereka yang berdomisili di pedesaan. Hampir di segala bentuk aktivitas kegiatan gotong royong selalu ditemui, terkecuali dalam kaitannya dengan pertanian dan hal-hal yang menjadi mata pencaharian akan lebih bersifat memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan balasan atas tenaga yang telah dikorbankan. Namun selain daripada itu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan secara

sukarela, misalnya ketika terjadi kecelakaan hingga melaksanakan pesta dan upacara pesta.

4) Musyawarah dan jiwa musyawarah

Musyawarah yang dimaksud adalah bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat-rapat tidak berdasarkan suatu mayoritas, yang menganut suatu pendirian yang tertentu melainkan seluruh rapat seolah-olah sebagai suatu badan. Memiliki arti pula bahwa antara pihak mayoritas dan pihak minoritas mengesampingkan pendirian masing-masing untuk dapat saling mendekati.

2. Keuangan Mikro Islam

a. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Islam

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, yang dimaksud dengan lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha mikro kepada anggota masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.¹⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga keuangan mikro Islam adalah lembaga yang berbadan hukum

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Jakarta : Sekretariat Negara

yang operasional usahanya memberikan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹¹

Lembaga keuangan Islam berfungsi sebagai lembaga intermediasi nirlaba yang didasarkan kerjasama produktif, membagi laba dan rugi secara adil (*profit and lost sharing principle*). Prinsip kerjasama produktif dan adil ini dituangkan dalam skema pembiayaan dan *musyarakah*. Selain sebagai agen intermediasi bisnis, lembaga keuangan Islam juga berfungsi sebagai agen intermediasi keadilan distributif. Lembaga keuangan Islam juga berhak untuk ikut mengelola zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Hasil dari penghimpunan ZISWAF dapat disalurkan untuk memajukan sektor usaha mikro melalui pembiayaan *qardul hasan* yang mempunyai persyaratan yang sangat ringan. Bahkan secara prinsip *qardul hasan* bersifat pembiayaan *tabaruk* sehingga tidak perlu diharapkan pengembaliannya.¹²

b. Mekanisme Pembiayaan Dalam Keuangan Mikro Islam

Terdapat beberapa mekanisme yang digunakan dalam keuangan mikro Islam, diantaranya adalah :

1) Mekanisme Pembiayaan *Ijarah*

Ijarah atau sewa adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan

¹¹ Aisyah, “Pembiayaan Kepada LKM/LKMS, diakses dari www.mandirisyariah.co.id. Di akses pada 21 Januari 2020

¹² Arief Hoetoro, *Ekonomi Mikro Islam Pendekatan Integratif*, (Malang : UB Press, 2018), hlm. 22

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹³ Pembiayaan dengan menggunakan akad *ijarah* diperbolehkan berlandaskan pada Qs. Al-Qasas ayat 26 :

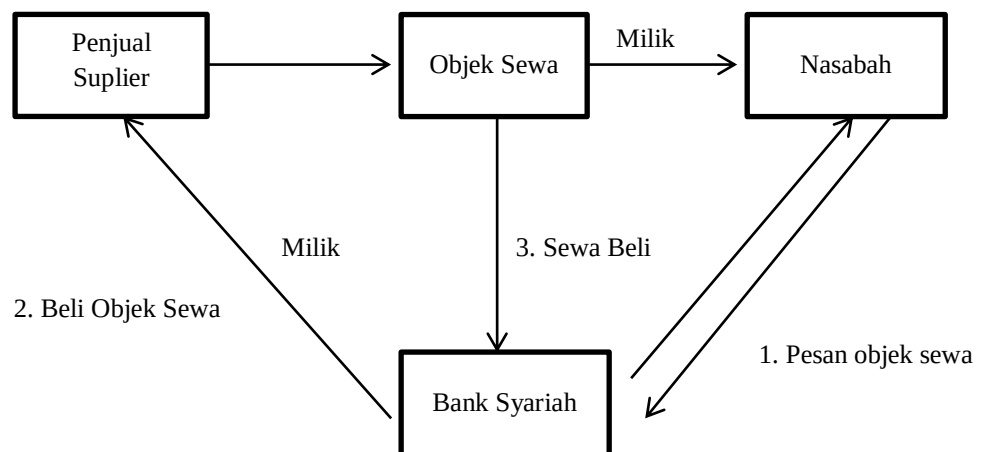
قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦

Artinya :

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Qs. Al-Qasas : 26)¹⁴

Proses pelaksanaan transaksi dengan menggunakan akad pembiayaan *ijarah* dalam prakteknya melalui beberapa tahapan, adapun mekanismenya adalah sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Bagan Mekanisme Ijarah



¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 117

¹⁴ Departemen Agama RI, *"Al-Qur'an dan Terjemahannya"*, hlm. 385

2) Mekanisme pembiayaan *murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan akad sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati didalamnya penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli.¹⁵ *Murabahah* diperbolehkan didasarkan pada Qs. Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

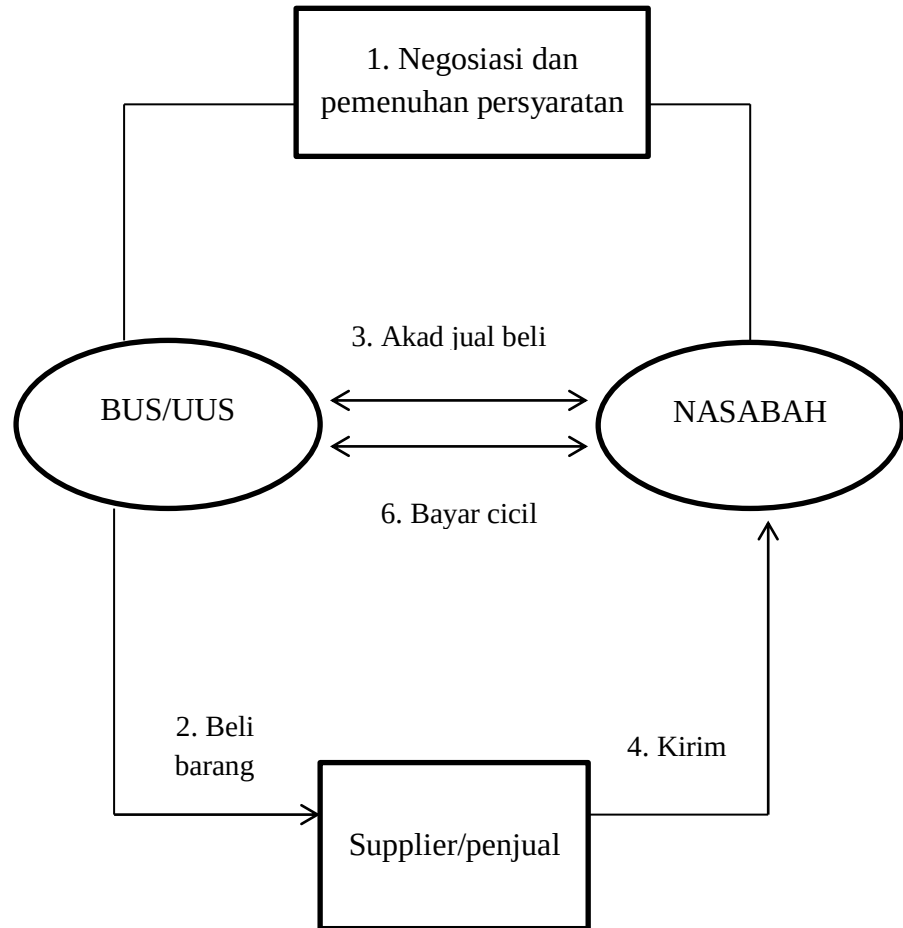
“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”.(Qs. Al-Baqarah : 275)¹⁶

Terdapat beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalankan transaksi pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*, berikut merupakan skema pembiayaan *murabahah*

¹⁵ Muhammad Yusuf, *Analisis Peranan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102*, Volume 4 No 1, Hlm. 15

¹⁶ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*”, hlm. 44

Gambar 2. 2
Bagan Mekanisme *Murabahah*



Keterangan :

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan.
2. Atas dasar negosiasi yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier.
3. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
4. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.

5. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.

6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah adalah dengan pembayaran angsuran.

3) Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (lembaga keuangan syariah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* diperbolehkan dengan berlandaskan pada Qs. Al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

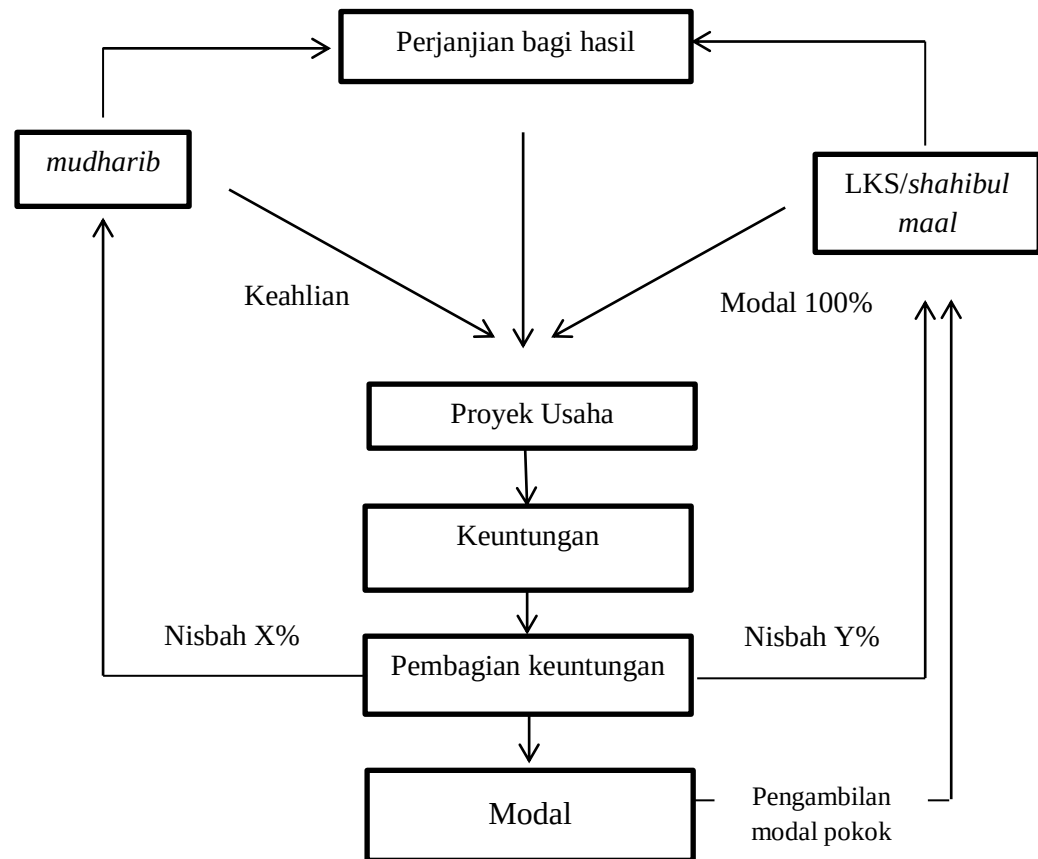
Artinya :

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Qs. Al-Jumu'ah : 10).¹⁷

Sama halnya dengan akad *ijarah* dan akad *murabahah*, transaksi pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* pun melalui beberapa tahapan sebagaimana terlihat pada skema berikut

¹⁷ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*”, hlm. 554

Gambar 2. 3
Gambar Mekanisme Mudharabah



Keterangan :

1. *Mudharib* dan *shahibul maal*/LKS sepakat bekerjasama dalam suatu proyek usaha, dimana *mudharib* berkontribusi melalui pemberian modal secara penuh .
2. Antara *mudharib* dan *shahibul maal*/LKS melakukan kesepakatan untuk perjanjian bagi hasil
3. Setelah proyek usaha dijalankan dan menghasilkan keuntungan, maka dilakukanlah pembagian keuntungan dengan besaran nisbah

X% kepada *mudharib*, dan sebesar Y% kepada *shahibul maal*/LKS.

4. Setelah akad berakhir maka modal pokok akan diambil kembali oleh *shahibul maal*/LKS.

4) Mekanisme pembiayaan *qardul hasan*

Qardul hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (peminjam hanya diharuskan membayar pokok utangnya) pinjaman yang seperti inilah yang diperbolehkan dan sesuai dengan ketentuan syariah atau dengan kata lain tidak mengandung unsur riba, karena ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain maka ia tidak diperbolehkan untung meminta pengembalian yang lebih besar dari nominal yang dipinjamkannya. Namun dalam hal ini peminjam diperbolehkan atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya.

Adapun pinjaman *qardh* bertujuan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial yakni untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Cara pelunasan dan waktu pelunasan pinjaman ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Walaupun sifat utang ini sangat lunak tidak berarti pihak yang berutang dapat semaunya sendiri, karena dalam Islam utang yang tidak dibayar akan menjadi penghalang di akhir nanti walaupun ia gugur dalam jihad di medan perang yang pahalanya sudah dijamin

bahkan rasul tidak bersedia untuk menshalatkan jenazah yang masih memiliki utang.¹⁸

Akad *qardul hasan* diperbolehkan dalam agama Islam berlandaskan pada Qs. Al-baqarah : 280 :

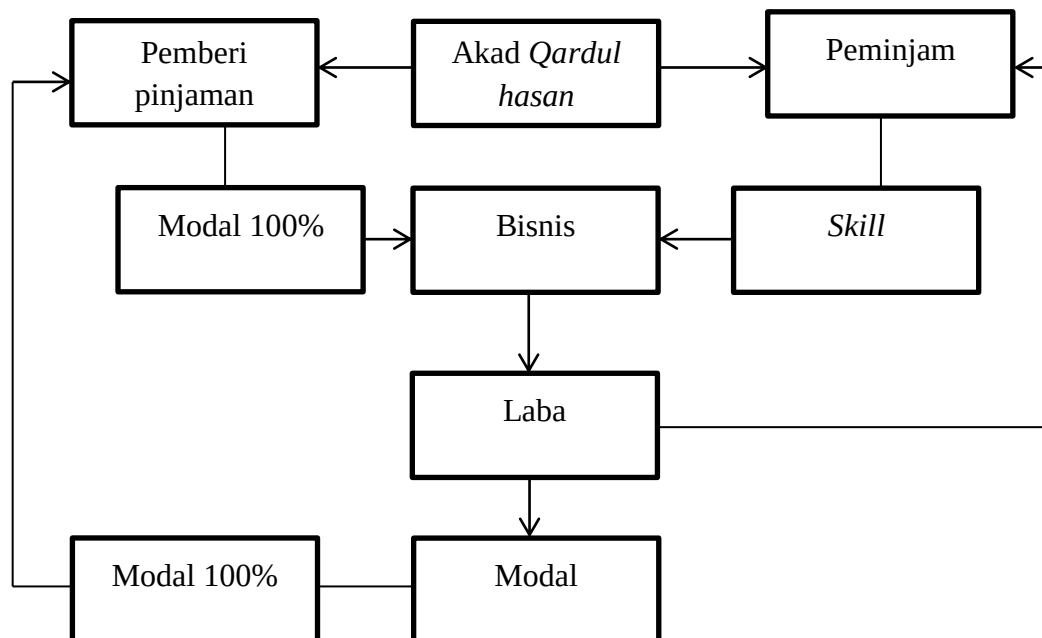
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
٢٨٠

Artinya :

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Qs. Al-Baqarah : 280)¹⁹

Berikut akan dijelaskan alur dalam mekanisme pembiayaan *qardul hasan* pada skema dibawah ini :

Gambar 2. 4
Gambar Mekanisme Qardul Hasan



¹⁸ Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 5*, (Jakarta : Salemba Empat), hlm. 239

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 47

Keterangan :

1. Pemberi pinjaman dan peminjam membuat kesepakatan dengan menggunakan akad *qardul hasan*
2. Pemberi pinjaman memberikan modal 100% pada bisnis yang dimiliki oleh peminjam, sementara itu peminjam berkontribusi dengan *skill* yang dimilikinya
3. Ketika bisnis tersebut sudah berjalan dan menghasilkan laba, maka laba yang dihasilkan sepenuhnya menjadi milik peminjam
4. Sementara itu modal yang sudah kembali dari bisnis yang dijalankan sepenuhnya akan kembali kepada pemberi pinjaman.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Daya memiliki arti yang sama dengan tenaga/kekuatan, yang berarti berdaya adalah memiliki tenaga/kekuatan. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan. Dalam bahasa Indonesia, pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris yaitu *empowerment* dalam dua arti yaitu memberi kemampuan atau cakap untuk melakukan sesuatu dan memberi kewenangan/kekuasaan.²⁰ Pemberdayaan masyarakat dalam

²⁰ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, “*Pemberdayaan Masyarakat*”, (Yogyakarta : CV Budi Utama), hlm. 1

bidang ekonomi artinya proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien.²¹

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu :²²

1) Perbaikan kelembagaan (*Better Institution*)

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik yang akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya. Dengan demikian tujuan lembaga akan mudah tercapai, target-target yang telah disepakati oleh seluruh anggota dalam lembaga tersebut pun mudah untuk direalisasikan.

Lembaga yang baik mempunyai visi, misi, dan tujuan yang jelas, sasaran yang dapat diukur serta program kerja yang terarah. Semua anggota lembaga tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diserahkan kepada masing-masing anggota secara jelas pada periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dengan demikian setiap anggota yang terlibat dalam kegiatan merasa berdaya dan merasa mempunyai peran untuk memajukan lembaga yang bersangkutan. Para anggota dapat

²¹ Darmawan Soecahyo, *Percepatan Pengembangan Desa Mandiri*”, (Surabaya : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, 2019), hlm. 529

²² Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hlm. 8-11

saling memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuannya melalui pengetahuan, pengalaman, dan keterampilannya dari waktu ke waktu.

2) Perbaikan Usaha (*Better Business*)

Setelah kelembagaan mengalami perbaikan, maka diharapkan berimplikasi pada adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut disamping itu perbaikan kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal ini juga diharapkan mampu mengembangkan lembaga tersebut, sehingga mampu memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh anggota yang bersangkutan.

3) Perbaikan pendapatan (*Better Income*)

Perbaikan bisnis diharapkan akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan atau *income* dari seluruh anggota lembaga tersebut dengan kata lain terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

4) Perbaikan lingkungan (*Better environment*)

Lingkungan pada saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Hal ini dengan alasan untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya, padahal bila kualitas manusia tinggi yang salah satu faktornya adalah memiliki pendidikan yang tinggi atau memiliki intelektual yang baik, maka manusia tidak akan merusak lingkungan.

Sebagai contoh, suatu kawasan menurut ketentuan pengetahuan yang berkembang harus memiliki ruang terbuka hijau sebanyak kurang lebih 40%. Hal itu berarti masyarakat diharapkan tidak semena-mena melakukan penebangan pohon yang bisa menyebabkan banjir atau longsor. Dengan demikian kondisi lingkungan fisik akan tetap terjaga.

5) Perbaikan kehidupan (*Better living*)

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator atau berbagai faktor. Diantaranya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan atau daya beli masing-masing keluarga. Dengan pendapatan yang membaik, diharapkan ada korelasi dengan keadaan lingkungan yang membaik pula. Pada akhirnya pendapatan dan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6) Perbaikan masyarakat (*Better community*)

Bila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik

berarti didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik, sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

c. Model Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi

Model pendekatan pemberdayaan ekonomi terbagi menjadi dua bagian yaitu model pendekatan yang bersifat *top down* yang berasal dari pemerintah dan model pendekatan yang bersifat *bottom up* yang berasal dari kekuatan masyarakat sendiri.²³

1) Model pendekatan pemberdayaan ekonomi *top down*

a) Bantuan Modal

Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi jika dilihat dari segi permodalan yaitu; Pertama, bagaimana pemberian modal bantuan ini tidak memberikan dampak ketergantungan bagi masyarakat; Kedua, bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; Ketiga, bagaimana skema penggunaan uang yang dapat mempunyai nilai tambah sehingga masyarakat tidak terjebak dengan penggunaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pokok.

²³ Alexander Phuk Tjilen, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Local Community Economic Empowerment And Corporate Social Responsibility) Teori Konsep Implementasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : CV Budi Utama), hlm. 6-7

Semua masalah ini dapat dipecahkan karena inti dari pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat.

Pemberian modal pun ada baiknya diberikan pendampingan dengan pelatihan manajemen keuangan dan motivasi kewirausahaan, hal tersebut akan relevan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi rakyat yang akan menjadikan ekonomi rakyat sebagai ekonomi yang tangguh, mandiri, berdaya saing dan modern.²⁴

b) Lembaga Keuangan

Secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, baik itu menghimpun uang, menyalurkan uang, atau melakukan keduanya. Maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana, menyalurkan dana atau melakukan keduanya yakni menghimpun dana dan menyalurkan dana.²⁵

Keberadaan dari lembaga keuangan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam aktivitas simpan pinjam, dan juga menjadi pelopor untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila dapat menyalurkan dana, sehingga dana tidak

²⁴ *Ibid.*, hlm. 9-10

²⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 3

hanya beredar di perkotaan tetapi juga dapat secara merata beredar ke pedesaan.²⁶

c) Bantuan Pembangunan Prasarana

Salah satu komponen penting dalam pemberdayaan ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Ketersediaan prasarana pemasaran atau transportasi akan membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian.

d) Bantuan pendampingan

Tugas utama dari pendamping adalah memfasilitasi proses belajar dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha kecil, menengah maupun usaha dalam skala besar.²⁷

2) Model Pemberdayaan Ekonomi Pendekatan *Bottom up*

a) Sumber Daya Manusia

Pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat terlepas dari pemberdayaan sumber daya manusia untuk melatih masyarakat sehingga mempunyai semangat kewirausahaan dan mampu melihat peluang usaha dengan potensi yang dimiliki. Semangat kewirausahaan masyarakat juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam yang keberadaannya memanjakan masyarakat, hal tersebut terbukti adanya karena masyarakat dapat

²⁶ Alexander Phuk Tjilen, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*,... hlm. 11

²⁷ *Ibid.*, hlm. 22

hidup dari sumber daya alam yang ada dengan menikmati langsung dari alam.²⁸

b) Sumber Daya Alam

Sumber daya alam dapat diartikan sebagai sesuatu yang masih terdapat di dalam maupun diluar bumi yang sifatnya masih potensial dan belum dilibatkan dalam proses produksi untuk meningkatkan tersedianya barang dan jasa dalam perekonomian.²⁹ Keberadaan sumber daya alam juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi masyarakat karena merupakan salah satu kekuatan pendorong yang sangat besar dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.³⁰

c) Lingkungan

Masyarakat pedesaan dalam hal ini amat melindungi lingkungan, dikarenakan mereka menggunakan sumber daya alam yang ada sesuai dengan kebutuhannya tanpa mengeksploitasi alam secara berlebihan.

d) Sosial budaya

Sosial budaya dari masyarakat pedesaan masih berjalan dengan baik, penerimaan program pemberdayaan ekonomi akan berhasil bila sejalan dengan budaya mereka. Masyarakat akan menerima budaya baru bila orang yang berasal dari luar (pendamping program) ikut mempelajari budaya yang ada.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 15

²⁹ M. Suparmoko, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, (Yogyakarta : BPFE), hlm. 5

³⁰ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hlm. 194

Budaya lokal untuk berkembang sudah tersedia, disini pendamping hanya perlu mengembangkan budaya tersebut dengan perkembangan ataupun program yang akan disampaikan.

e) Partisipasi

Tingkat partisipasi perempuan untuk mencari nafkah dan membangun kampung masih rendah, perempuan masih lebih berperan dalam partisipasi keluarga. Budaya masyarakat kampung menjunjung tinggi kedudukan laki-laki sebagai kepala keluarga dan bekerja secara fisik, dan perempuan lebih banyak bekerja untuk kegiatan dalam rumah tangga dan menjaga anak.

d. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), program berarti rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian dan sebagainya) yang akan dijalankan.³¹ Sementara itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien.

Agar pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat mencapai hasil yang maksimal, diperlukan beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu :³²

³¹ Kbbi.web.id. Diakses pada 23 Januari 2019

³² Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, Imam Hanafi, *“Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Volume 1 No 4, hlm. 12

1. Tahap persiapan

Arti persiapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perlengkapan dan persediaan (untuk sesuatu); perbuatan (hal dan sebagainya) bersiap-siap atau mempersiapkan; tindakan (rancangan dan sebagainya) untuk sesuatu.³³

Persiapan adalah upaya pertama yang dilakukan tentang apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu.

Dalam prosesnya terdapat empat tahap dasar dalam melakukan suatu persiapan yakni sebagai berikut :³⁴

- a. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif.
- b. Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi suatu organisasi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang.
- c. Mengidentifikasi gejala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu

³³ Diakses dari <https://kbbi.web.id> pada Rabu 5 Agustus 2020

³⁴ Mamik, *Pelayanan Kesehatan dan Kebidanan*, (Sidoarjo : Zifatama Jawara), hlm. 44-45

diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstren yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah.

- d. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan tahap akhir yang meliputi pengembangan berbagai alternatif-alternatif untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan) diantara berbagai alternatif yang ada.

Sementara itu menurut Isbandi Rukminto Adi tahapan terdapat dua unsur utama yang diperlukan dalam tahapan persiapan yakni petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas ditujukan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih sedangkan penyiapan lapangan ditujukan untuk melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.

Penyiapan petugas atau tenaga pemberdayaan masyarakat sangat penting supaya efektivitas program atau kegiatan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik.³⁵

2. Tahap pelaksanaan program

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti proses, cara, perbuatan

³⁵ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hlm. 13

melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).³⁶

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana pelaksanaan dapat diartikan penerapan.³⁷

Terdapat beberapa faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut :

- a. Komunikasi merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggungjawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen daripada pelaksanaan program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur birokrasi yaitu *Standar Operating Producers* (SOP) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

³⁶ Diakses dari <https://kbbi.web.id> pada Selasa, 4 Agustus 2020

³⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), hlm. 70

Dalam prakteknya, terdapat keterkaitan di antara 4 faktor tersebut sehingga dipandang mampu mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi. Disamping itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :³⁸

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

3. Tahap evaluasi

Menurut pengertian bahasa, kata evaluasi berasal dari kata *evaluation* dalam bahasa Inggris yang artinya penilaian atau penaksiran. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) evaluasi berarti penilaian.³⁹ Evaluasi mengandung tiga pengertian yaitu :⁴⁰

³⁸ Abdullah Syukur, *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Ujung Pandang : Persadi, hlm. 40

³⁹ Diakses dari <https://kbbi.web.id> pada Selasa, 4 Agustus 2020

⁴⁰ Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedi Pendidikan*, (Jakarta : Gunung Agung), hlm. 83

- a. Suatu proses menetapkan nilai atau jumlah dari suatu taksiran yang sama,
- b. Suatu proses untuk menetapkan kepentingan *relative* dari fenomena-fenomena dan jenis yang sama atas dasar suatu standar tertentu, dan
- c. Perkiraan kenyataan atas dasar ukuran nilai tertentu dan dalam rangka situasi yang khusus dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

Evaluasi merupakan proses yang membantu sesuatu menjadi lebih baik melalui identifikasi dan dokumentasi beberapa perbedaan hasil kegiatan masa lalu dan sekarang untuk menafsir apa yang akan dilakukan berikutnya.⁴¹

Dalam pelaksanaan evaluasi terdapat 7 elemen yang harus dilakukan yaitu :⁴²

- a. Fokus pada apa yang akan di evaluasi (*focusing the evaluation*)
- b. Memiliki rancangan evaluasi (*designing the evaluation*)
- c. Mengumpulkan informasi (*collecting information*)
- d. Menganalisis dan menginterpretasikan informasi (*analyzing and interpretation*)
- e. Pengaturan/pengelolaan evaluasi (*managing evaluation*)
- f. Evaluasi untuk evaluasi (*evaluaty evaluation*)

⁴¹ Roger Kauffman dan Susan Thomas, *Evaluation Without Fear*, (New York : New View Points), hlm. 9

⁴² Brinkerhoff, R.O., Brethower, D.M., Hluchyj, T., et al, *Program Evaluation : A Practitioner's Guide for Trainers and Educators*, (Boston : Kluwer Nijhoft Publishing), hlm. 1-6

Dalam merumuskan evaluasi terdapat tiga elemen pokok yang harus dinyatakan yaitu :⁴³

- a. Adanya intervensi yang diberikan secara sengaja terhadap program yang direncanakan
- b. Adanya tujuan atau sasaran yang diinginkan atau diharapkan dan mempunyai nilai positif
- c. Adanya metode untuk menentukan taraf pencapaian tujuan sebagaimana diharapkan.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan evaluasi program diantaranya adalah sebagai berikut :⁴⁴

- a. Persiapan evaluasi program
 - Penyusunan evaluasi
 - Penyusunan instrumen evaluasi
 - Validasi instrumen evaluasi
 - Menentukan jumlah sampel yang diperlukan
 - Penyamaan persepsi antar evaluator sebelum data di ambil
- b. Pelaksanaan evaluasi program

Pelaksanaan evaluasi program dapat dikategorikan evaluasi reflektif, evaluasi rencana, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Keempat jenis evaluasi tersebut mempengaruhi evaluator dalam menentukan metode dan alat pengumpul data yang digunakan.

⁴³ Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, (Jakarta : PT Gramedia), hlm. 2

⁴⁴ Farida Yusuf Tayibnafis, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*, (Jakarta : Rineka Cipta), hlm. 26

Adapun dalam proses pengumpulan data dapat menggunakan berbagai alat pengumpul data antara lain :

- Pengambilan data dengan tes
- Pengambilan data dengan observasi (dapat berupa *check list*, alat perekam suara atau gambar)
- Pengambilan data dengan angket
- Pengambilan data dengan wawancara
- Pengambilan data dengan menggunakan metode analisis dokumen dan artefak atau dengan teknik lainnya.

c. Tahap monitoring

Monitoring pelaksanaan evaluasi berfungsi untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan rencana program. Sasaran monitoring adalah seberapa pelaksanaan program dapat diharapkan/telah sesuai dengan rencana program, apakah berdampak positif atau negatif. Adapun teknik dan alat monitoring dapat berupa :

- Teknik pengamatan partisipatif
- Teknik wawancara
- Teknik pemanfaatan dan analisis data dokumentasi
- Evaluator atau praktisi atau pelaksana program
- Perumusan tujuan pemantauan
- Penetapan sasaran pemantauan
- Penjabaran data yang dibutuhkan

- Penyiapan metode/alat pemantauan sesuai dengan sifat dan sumber/jenis data
- Perencanaan analisis data pemantauan dan pemaknaannya dengan berorientasi pada tujuan monitoring

B. Penelian Terdahulu

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Dede Ilyas dengan judul *“Peranan MISYKAT DPU Daarut Tauhiid Bandung Dalam Pemberdayaan Mustahiq (Studi Kasus : Majelis Al-Amanah Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung)* pada tahun 2008. Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian. Persamaannya adalah metode penelitian yang digunakan yakni melalui penelitian langsung ke lapangan (*field research*) serta pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat dilakukannya penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan MISYKAT di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung telah mampu memfasilitasi anggota dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar. Melalui pemberian modal usaha tanpa bunga, anggota tidak merasa terbebani dan secara sukrela mengikuti kegiatan rutin pendampingan.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Auliaa Rahmani dengan judul *“Implementasi Total Quality Management Dalam Penyaluran Dana Zakat Pada Program MISYKAT Di Daarut Tauhiid Peduli Priangan Timur”* pada tahun 2018. Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian.

Adapun persamaannya adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Sedangkan perbedaannya adalah waktu dan tempat dilakukannya penelitian. Sementara itu hasil dari penelitian ini adalah di tempat penelitian ini dilaksanakan terdapat beberapa unsur *total quality management* yang telah terpenuhi yakni fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan sistem berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan serta yang terakhir adalah adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.

C. Kerangka Pemikiran

Zakat yang diberikan kepada *mustahik* akan berperan sebagai pendukung peningkatan perekonomian mereka, jika zakat tersebut digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif melalui disalurkan dana zakat kepada *mustahik* untuk digunakan sebagai modal usaha yakni untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya (*mustahik*), dan supaya *mustahik* dapat membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan digulirkannya dana zakat tersebut untuk keperluan usaha maka *mustahik* akan mendapatkan penghasilan, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha hingga *mustahik* mampu menyisihkan penghasilannya untuk menabung.⁴⁵

⁴⁵ Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", Jurnal Ekonomi Islam, 2008, Vol. 2 No. 1, hlm. 77

Penyaluran dana zakat akan lebih optimal jika dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat, karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan serta pendistribusian dana zakat tidak begitu saja memberikan dana zakat kepada *mustahik*, melainkan disertai dengan pendampingan, pemberian pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar digunakan untuk keperluan usaha.

Bentuk nyata dari penyaluran dana zakat produktif tercermin pada program MISYKAT (*Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat*) yang merupakan program unggulan dari LAZ DT Peduli. Program ini memberikan angin segar kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dengan membantu mereka menjadi lebih produktif. Agar program ini berhasil mencapai tujuannya, maka lembaga perlu memperhatikan beberapa tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan program MISYKAT yakni ;⁴⁶ Pertama tahap persiapan yang meliputi penetapan tujuan yang jelas, rumusan kondisi pada saat ini, identifikasi gejala kemudahan dan hambatan yang akan dihadapi serta mengembangkan rencana yang telah disusun untuk pencapaian tujuan akhir; Kedua, tahap pelaksanaan yang meliputi komunikasi antar pelaksana kegiatan, ketersediaan sumber daya, komitmen dalam pelaksanaan program baik itu dari pihak lembaga maupun dari anggota program, serta struktur birokrasi yang jelas; Ketiga, tahap evaluasi yang meliputi persiapan pelaksanaan evaluasi, pengambilan sampel, serta monitoring kepada anggota program.

⁴⁶ Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, Imam Hanafi, “Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Volume 1 No 4, hlm. 12

Gambar 2. 5
Bagan Kerangka Pemikiran

